PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN/KOTA PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2016-2024

TUGAS AKHIR

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

SASA ANISA

B1011221107

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama	:	Sasa Anisa
NIM	:	B1011221107
Jurusan	:	Ilmu Ekonomi
Program Studi	:	Ekonomi Pembangunan
Judul TA	:	Pengaruh PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Tugas Akhir (TA) dengan judul tersebut di atas.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak,



(Sasa Anisa)
NIM. B1011221107

PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Sasa Anisa
NIM	: B1011221107
Jurusan	: Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Judul Proposal/TA	: Pengaruh PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir (TA) adalah karya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 25 September 2026



Sasa Anisa

NIM. B1011221107

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh PDRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024

Penanggung Jawab Yuridis

Sasa Anisa
B1011221107

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 25 Juni 2026

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1.	Pembimbing Utama	Dr. Akhmad Yani, S.E., M.Si NIP 196212291988101001	16/06/26	
2.	Ketua Penguji	Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si NIP 197206071998032001	16/06/26	
3.	Anggota Penguji	U. Sulia Sukmawati, S.Si., M.E NIP 198501132024212000	14/06/26	

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontianak,
Koordinator Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Yanto, S.E., M.Sc.
NIP 197706152003121004

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Pengaruh DPRB Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024**" ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta para-sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Penyusunan skripsi ini bukanlah sekadar rangkaian tugas akademik yang harus diselesaikan, melainkan sebuah perjalanan panjang untuk memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Ada masa-masa ketika semangat membuncah begitu rupa, seolah tak ada rintangan yang tak dapat dilalui. Namun ada pula masa-masa ketika lelah, ragu, dan bayang-bayang kegagalan datang bergantian, menguji sejauh mana keteguhan hati dapat bertahan. Dari perjalanan itu, penulis belajar satu hal yang berharga, bahwa proses tidak selalu berjalan seperti yang dibayangkan, tetapi setiap langkah kecil yang terus diperjuangkan pada akhirnya akan menuntun seseorang semakin dekat pada tujuan yang dituju.

Skripsi ini adalah saksi bisu bahwa tidak ada pencapaian yang lahir semata dari kemampuan pribadi. Di balik setiap lembar yang tersusun rapi, tersimpan doa yang tak pernah henti dipanjatkan, dukungan yang diberikan dengan tulus, waktu yang rela dikorbankan, serta kepercayaan dari orang-orang terkasih yang senantiasa meyakinkan penulis untuk terus melangkah tatkala semangat mulai goyah. Atas izin dan kehendak Allah SWT, penulis dipertemukan dengan begitu banyak orang baik yang hadir bagai cahaya penguat, pembimbing yang sabar, dan penyemangat yang setia dalam setiap babak proses yang telah dilalui.

Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan doa, dukungan, bimbingan, ilmu, dan bantuan baik yang tampak maupun yang tak tampak sehingga penulis mampu menuntaskan tugas akhir ini dengan baik. Secara khusus, penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Juanda Astarani, S.E., M.Sc., CSRS., ACPA., CfrA., CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Ibu Nurul Bariyah, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Yanto, S.E., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Dr. Akhmad Yani, S.E.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir sekaligus dosen pembimbing akademik
5. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E., M.Si selaku dosen penguji pertama yang juga telah memberikan saran, perbaikan serta kritik dalam penulisan tugas akhir.
6. Ibu U. Sulia Sukmawati, ME, selaku dosen penguji kedua yang telah memberikan nasihat, arahan, bimbingan, serta semangat kepada penulis dalam penulisan tugas akhir.
7. Seluruh Staf Akademik, Perpustakaan, dan Tata Usaha serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan, pelayanan, serta kemudahan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan hingga selesainya penyusunan tugas akhir ini.
8. Seluruh pengurus KIPK Universitas Tanjungpura yang membantu penulis dalam menghadapi masalah ekonomi penulis. Bimbingan, motivasi, serta nasehat yang diberikan setiap evaluasi akademik sangat berkesan dan membekas dihati penulis. Tanpa bantuan pengurus KIPK Universitas Tanjungpura mungkin penulis tidak akan bisa menyelesaikan perkulihan tepat waktu.
9. Kepada Sasa Anisa selaku penulis, terima kasih karena telah memilih untuk tetap bertahan di setiap keadaan yang tidak mudah, tetap melangkah ketika rasa lelah, takut, dan ragu datang silih berganti, serta tidak menyerah meskipun perjalanan ini dipenuhi air mata, revisi yang seakan tidak ada habisnya, dan berbagai kegagalan kecil yang sempat membuatmu ingin berhenti. Skripsi ini bukan sekadar syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi menjadi saksi bahwa setiap doa, pengorbanan, kesabaran, dan usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan menemukan titik akhirnya. Hari ini, bukan hanya sebuah karya yang berhasil diselesaikan, tetapi juga bukti bahwa kamu mampu melewati masa-masa yang dulu terasa mustahil. Semoga keberhasilan kecil ini selalu mengingatkanmu bahwa tidak ada perjuangan yang

sia-sia, dan bahwa setiap langkah yang diiringi ikhtiar serta doa akan selalu menemukan jalannya.

10. Kepada wanita paling berharga dalam hidup penulis yaitu ibu Noni tercinta, sosok yang paling berjasa dalam setiap jengkal perjalanan hidup penulis. Terima kasih tidak akan pernah cukup untuk membalas segala pengorbanan yang telah Ibu berikan sejak penulis membuka mata pertama kali di dunia ini. Ibu adalah doa yang tak pernah putus, air mata yang disembunyikan agar penulis tak pernah merasa terbebani, dan kekuatan yang selalu ada meski raga lelah menahan beban kehidupan. Setiap keringat yang Ibu curahkan, setiap malam yang Ibu lalui dengan penuh kekhawatiran akan masa depan penulis, serta setiap kata penyemangat yang Ibu ucapkan di saat penulis hampir menyerah, menjadi pondasi yang menopang penulis untuk terus berdiri hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ibu tidak pernah sekalipun meminta balasan, namun cinta yang Ibu berikan tanpa syarat itulah yang menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk tidak pernah berhenti berjuang. Tiada kata yang mampu melukiskan betapa besar rasa sayang dan hormat penulis kepada Ibu. Gelar yang akan penulis raih ini bukanlah semata pencapaian pribadi, melainkan buah dari doa dan pengorbanan Ibu yang tak ternilai harganya. Kepada Ibu, sosok paling berharga yang Allah SWT titipkan dalam hidup penulis terima kasih telah menjadi rumah yang selalu hangat untuk pulang, menjadi alasan penulis untuk terus melangkah, dan menjadi cinta pertama yang paling tulus yang pernah penulis kenal.
11. Kepada Ayah tercinta Bapak Marwanto, sosok yang dengan gagah menopang seluruh beban keluarga tanpa pernah sekali pun mengeluh. Terima kasih atas setiap peluh yang menetes di bawah terik matahari, atas setiap tenaga yang dikerahkan hingga batas kemampuan, semata-mata agar penulis dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang ini. Ayah adalah punggung yang kokoh, tempat seluruh harapan keluarga disandarkan, namun tak pernah sekalipun memperlihatkan lelah di hadapan penulis. Ayah mungkin tidak banyak berucap, sebab kasih sayang Ayah lebih sering terwujud dalam bentuk kerja keras dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rupiah yang Ayah kumpulkan dengan susah payah, setiap malam yang Ayah lalui dengan memikirkan masa depan penulis, serta setiap kepercayaan yang Ayah titipkan tanpa pernah menuntut balasan, menjadi alasan penulis untuk tidak pernah membiarkan perjuangan ini berakhir sia-sia. Skripsi ini penulis persembahkan sebagai wujud syukur dan

penghormatan tertinggi kepada Ayah, sebab gelar sarjana yang akan penulis sandang bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan sejarah baru yang pertama kali tercipta dalam keluarga sebuah mimpi yang Ayah perjuangkan sejak lama, kini hadir menjadi kenyataan.

12. Kedua Adik penulis Nurhidayat dan Safa Mareti tercinta, terima kasih atas segala pengorbanan yang barangkali tidak pernah terucap, namun begitu terasa maknanya. Penulis menyadari, ada banyak keinginan yang harus ditunda, ada impian-impian kecil yang terpaksa disimpan lebih dulu, semata agar penulis dapat melangkah dan menyelesaikan perjalanan panjang ini. Pengorbanan yang tidak terlihat itu justru menjadi salah satu bentuk cinta yang paling tulus, sebab tidak semua orang mampu merelakan bagiannya demi kebahagiaan orang lain. Penulis tahu, di balik dukungan yang diberikan tanpa banyak kata, tersimpan harapan-harapan yang mungkin harus mengalah, waktu yang semestinya bisa digunakan untuk diri sendiri namun rela dibagi, serta ruang yang dilapangkan agar penulis dapat lebih dulu meraih apa yang dicita-citakan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi keluh kesah, telah menjadi pengingat untuk terus bertahan, dan telah menjadi saudara yang selalu ada meski dengan caranya sendiri yang tidak selalu terucap secara langsung.
13. Kepada Sepupu sekaligus teman sekamar penulis yaitu Tria terima kasih sudah menjadi salah satu orang yang menemani perjalanan panjang ini. Terima kasih untuk kebersamaan, cerita, dan hal-hal sederhana yang mungkin terlihat sepele, tetapi begitu berarti selama kita tinggal bersama. Terima kasih juga karena sudah menjadi orang pertama yang menjadi tempat penulis meminta bantuan. Semoga kita selalu diberi kesempatan untuk tumbuh, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang kita sayangi. Terima kasih sudah menjadi sepupu, teman, sekaligus teman sekamar yang menjadi bagian dari perjalanan hidupku.
14. Teman-teman SMA penulis, Mita, Egi, Memei, terima kasih telah setia membersamai penulis dalam suka maupun duka, menjadi saksi bisu atas setiap tawa yang pecah dan air mata yang sesekali menetes di sepanjang perjalanan ini. Meski kini jalan hidup membawa kita ke arah yang berbeda-beda, persahabatan ini tak pernah kehilangan maknanya justru semakin terasa berharga, sebab di tengah kesibukan yang berbeda, kita masih menyempatkan diri untuk saling menyapa dan berbagi cerita. Terima kasih telah meluangkan waktu di sela padatnya kehidupan masing-masing, hanya untuk sekadar berkumpul, tertawa bersama, dan bertukar kisah tentang hal-hal kecil yang

ternyata mampu menjadi obat bagi penat yang menumpuk. Tanpa disadari, momen-momen sederhana bersama kalian menjadi pelarian yang menenangkan di tengah lelahnya berkutat dengan lembar demi lembar skripsi ini. Kehadiran kalian mengajarkan penulis bahwa persahabatan sejati tidak pernah lekang oleh jarak maupun perbedaan jalan yang ditempuh ia tetap tumbuh, menguatkan, dan menjadi rumah kedua untuk kembali pulang.

15. Teman senasib-seperjuangan yaitu Lola, Kak Serly, Sela, Sarini, Bia, Nana, Putri dan Cei, terima kasih telah menjadi tinta dalam kanvas penulis, terima kasih telah menjadi tempat aman bagi penulis, 4 tahun bersama kalian rasanya sangat singkat karena kebersamaan dan kepercayaan yang terjalin. Membayangan akan berpisah dengan kalian rasanya begitu menyesakan sampai penulis tidak mampu membendung air mata. Tawa, tangis, keluh kesah, dan sedikit omelan dari kalian sangat berkesan bagi penulis.
16. Kepada teman-teman seperjuangan Kelas C, Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2022, yang telah mewarnai setiap babak perjalanan perkuliahan penulis. Terima kasih atas gelak tawa yang selalu memenuhi ruang kelas, atas kebersamaan yang tak tergantikan, kerja sama yang terjalin erat, dukungan yang selalu hadir tanpa diminta, serta berbagai pengalaman berharga yang telah kita lalui bersama sepanjang menempuh pendidikan di bangku kuliah.
17. Tak lupa, penulis menghaturkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah turut berperan, baik dalam proses penelitian ini maupun dalam perjalanan hidup penulis, yang namanya mungkin tidak dapat disebutkan satu demi satu dalam lembar ini. Namun ketahuilah, tanpa uluran tangan dan kebaikan kalian, karya tulis ini tidak akan pernah sampai pada titik penyelesaiannya. Setiap bantuan sekecil apa pun, setiap doa yang terucap diam-diam, dan setiap dukungan yang diberikan dengan tulus, akan selalu penulis kenang dengan penuh rasa syukur.

Pontianak, 27 September 2026

Sasa Anisa

B1011221107

PENGARUH PDRB PERKAPITA, PENGELUARAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT 2016-2024

Sasa Anisa

Universitas Tanjungpura, Indonesia

ABSTRACT

This research analyzes the influence of Per Capita Gross Regional Domestic Product (GRDP), government spending on education, and government spending on health on HDI across 14 regencies and cities in West Kalimantan Province during the 2016–2024 period. Panel data were analyzed using a panel regression method processed with EViews 12, and based on the Chow and Hausman tests, the Fixed Effect Model (FEM) was selected as the best-fitting estimation model. The estimation results show that Per Capita GRDP has a positive and significant effect on HDI, with a coefficient of 0.750738. Government education expenditure likewise shows a positive and significant effect, with a coefficient of 0.007759, as does government health expenditure, with a coefficient of 0.005484. Jointly, all three variables significantly affect HDI, as indicated by an F-statistic of 84.63 with a probability of 0.00. The model explains 92.55 percent of the variation in HDI across the province's regencies and cities (R^2), with the remainder attributable to factors outside the model.

Keywords: *Human Development Index (HDI), Per Capita gross regional domestic product, Government Expenditure on Education, Government Expenditure on Health, West Kalimantan.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh PDRB per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan, dan belanja pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2016–2024. Data panel dianalisis menggunakan metode regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak EViews 12, dan berdasarkan hasil Uji Chow serta Uji Hausman, Fixed Effect Model (FEM) dipilih sebagai model estimasi terbaik. Hasil estimasi menunjukkan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dengan koefisien sebesar 0,750738. Belanja pemerintah bidang pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan dengan koefisien sebesar 0,007759, demikian pula belanja pemerintah bidang kesehatan dengan koefisien sebesar 0,005484. Secara simultan, ketiga variabel tersebut terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM, ditunjukkan oleh nilai F-statistik sebesar 84,63 dengan probabilitas 0,00. Model penelitian ini mampu menjelaskan 92,55 persen variasi IPM antarkabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat (R^2), sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

Kata Kunci: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB Per Kapita, Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan, Fixed Effect Model, Kalimantan Barat.

b1011221107@student.untan.ac.id

RINGKASAN

1. Pendahuluan

Kualitas sumber daya manusia memiliki peran strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional. Paradigma pembangunan kini tidak lagi terbatas pada capaian ekonomi semata, melainkan telah bergeser ke pendekatan multidimensional yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan harapan hidup. Pergeseran ini sejalan dengan pemikiran Todaro dan Smith (2011) yang menekankan bahwa esensi pembangunan terletak pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penghormatan martabat, serta perluasan kesempatan individu. UNDP kemudian mengoperasionalkan pendekatan ini melalui Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan, serta kemampuan mencapai standar hidup yang layak.

Berdasarkan data BPS periode 2016–2024, rata-rata IPM Indonesia berada di angka 72,61, namun capaiannya belum merata antarprovinsi. Beberapa provinsi mencatat kinerja tinggi, seperti DKI Jakarta (81,73) dan DI Yogyakarta (80,04), yang didukung oleh fasilitas pendidikan memadai, akses kesehatan yang baik, dan aktivitas ekonomi yang maju. Kalimantan Barat mencatatkan rata-rata IPM sebesar 68,43 masih di bawah rata-rata nasional dengan selisih 4,18 poin, dan menjadi provinsi dengan IPM terendah di Pulau Kalimantan, tertinggal dari Kalimantan Timur (76,56), Kalimantan Selatan (72,22), Kalimantan Tengah (71,87), dan Kalimantan Utara (71,32). Meskipun IPM Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan dari 65,88 (2016) menjadi 71,19 (2024), lajunya masih terbilang lambat dan belum masuk kategori tinggi.

Ketimpangan IPM juga sangat mencolok di internal Provinsi Kalimantan Barat. Kota Pontianak mencatat IPM tertinggi sebesar 82,22 pada 2024, sementara Kabupaten Kayong Utara hanya meraih 67,05 pada tahun yang sama, selisih 15,17 poin dalam satu provinsi. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa pembangunan manusia masih sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan belum merata hingga ke pelosok. Ketimpangan tersebut diduga berkaitan erat dengan disparitas PDRB per kapita antarwilayah. Kota Pontianak secara konsisten menempati posisi teratas dengan PDRB per kapita Rp35,3 juta (2016) hingga Rp42,27 juta (2024), sementara Kabupaten Melawi berada di posisi terbawah dengan hanya Rp14,77 juta hingga Rp16,53 juta. Selisih sebesar Rp25,74 juta pada 2024 mencerminkan kesenjangan ekonomi yang masih lebar, dan pola ini secara langsung terefleksikan dalam ketimpangan capaian IPM antardaerah.

Selain itu, PDRB per kapita, alokasi belanja pemerintah daerah di sektor pendidikan juga berperan penting. Beberapa daerah seperti Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, dan Kubu Raya mencatat realisasi belanja pendidikan yang lebih besar dibanding daerah lain. Kabupaten Ketapang misalnya mengalami lonjakan dari sekitar Rp496 miliar (2016) menjadi lebih dari Rp783 miliar (2024). Namun disparitas alokasi antarwilayah tetap ada, mencerminkan perbedaan kapasitas fiskal dan orientasi prioritas pembangunan masing-masing daerah.

Dari sisi kesehatan, anggaran yang direalisasikan menunjukkan kecenderungan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Kabupaten Ketapang, Kapuas Hulu, Sanggau, dan Kota Pontianak mencatat realisasi belanja kesehatan yang relatif besar. Investasi kesehatan ini sangat relevan mengingat kaitannya langsung dengan angka harapan hidup, salah satu komponen utama dalam penghitungan IPM. Meski demikian, temuan sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi ada yang menemukan pengaruh positif dan signifikan, ada pula yang tidak mengindikasikan bahwa efektivitas belanja sangat bergantung pada kualitas tata kelola.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji seberapa besar kontribusi PDRB per kapita, belanja pemerintah bidang pendidikan, dan belanja pemerintah bidang kesehatan dalam membentuk IPM pada seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2016–2024. Variasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat memiliki implikasi langsung terhadap ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah, di mana daerah dengan kemampuan fiskal kuat cenderung menunjukkan capaian IPM yang lebih baik dibanding daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.

2. Rumusan Masalah

2.1 Pernyataan Masalah

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah. Faktor ekonomi seperti PDRB per kapita diduga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena semakin tinggi pendapatan per kapita maka semakin besar kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Selain faktor ekonomi, peran pemerintah melalui pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan juga menjadi faktor penting dalam peningkatan IPM. Kedua sektor tersebut merupakan komponen utama dalam pembangunan manusia sehingga alokasi anggaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun, perbedaan kapasitas fiskal daerah serta efektivitas pengelolaan anggaran dapat menyebabkan dampak pengeluaran pemerintah terhadap IPM menjadi tidak merata. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mengenai pengaruh PDRB per kapita serta pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2016–2024.

2.2 Pertanyaan Masalah

1) Bagaimana pengaruh PDRB per kapita terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?

3) Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?
4) Bagaimana pengaruh PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap IPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

2.3 Tujuan

1) Menguji pengaruh PDRB per kapita terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024
2) Menguji pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024
3) Menguji pengaruh pengeluuaran pemerintah bidang kesehatan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024
4) Menguji pengaruh PDRB perkapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan secara simultan terhadap IPM kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024

3. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan regresi data panel. Data mencakup 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama 9 tahun (2016–2024), menghasilkan 126 observasi seimbang (balanced panel). Sumber data: BPS untuk IPM dan PDRB per kapita; DJPK untuk realisasi belanja pemerintah. Model regresi yang digunakan:

$$\mathbf{IPMit = \beta_0 + \beta_1 PDRBit + \beta_2 PPPit + \beta_3 PPKit + \varepsilon it}$$

Pemilihan model dilakukan melalui Uji Chow dan Uji Hausman, keduanya mengarah pada Fixed Effect Model (FEM) sebagai model terbaik. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas (Jarque-Bera), multikolinieritas (koefisien korelasi antarvariabel), dan heteroskedastisitas (Glejser). Seluruh pengujian diproses menggunakan EViews 12.

4. Hasil dan Pembahasa

Hasil estimasi Fixed Effect Model menunjukkan bahwa PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat periode 2016–2024. Ketiganya juga berpengaruh signifikan secara simultan, dengan R^2 sebesar 92,55%, sehingga H1 hingga H4 diterima.

Pengaruh PDRB per kapita terhadap IPM dimaknai melalui Pendekatan Kapabilitas Sen, di mana pendapatan hanyalah sarana (means), bukan tujuan pembangunan itu sendiri. Analisis kuadran PDRB–IPM menunjukkan empat pola yaitu Kuadran I (Pontianak, Singkawang, Kubu Raya) memiliki faktor konversi sosial kuat sehingga pertumbuhan ekonomi efektif menjadi kapabilitas; Kuadran II (Sambas, Bengkayang) mencapai IPM relatif baik meski PDRB rendah, menunjukkan peran investasi sosial yang independen dari pendapatan; Kuadran III (Melawi, Landak, Mempawah, Sekadau, Kayong Utara, Sintang) mengalami kegagalan ganda pada sarana dan faktor konversi ("*unfreedom*"); sementara Kuadran IV (Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu) menunjukkan PDRB tinggi berbasis sektor ekstraktif

namun IPM rendah karena nilai tambah tidak terkonversi menjadi layanan publik yang memadai.

Untuk pengaruh pemgaru pengeluaran pemerintah bidang pendididkan terhadap IPM, analisis kuadran Pengeluaran pemerintah bidang pendididikan–Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mengungkap tidak ada daerah pada Kuadran I (anggaran tinggi–RLS tinggi), menandakan belum ada kabupaten/kota yang berhasil mengonversi anggaran pendidikan besar menjadi capaian pendidikan unggul. Beberapa daerah justru berada di Kuadran II (RLS tinggi meski anggaran rendah), mengindikasikan peran conversion factors seperti kualitas guru dan kondisi sosial ekonomi, sementara Kuadran IV (anggaran tinggi–RLS rendah) menunjukkan inefisiensi konversi anggaran menjadi hasil pendidikan.

Pada dimensi kesehatan, karena Umur Harapan Hidup (UHH) lebih representatif dibanding IPM komposit, analisis kuadran pengeluaran pemerintah bidang kesehatan–UHH hanya menghasilkan dua kelompok: Kuadran I (Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan tinggi–UHH tinggi, mencakup Sanggau, Pontianak, Kapuas Hulu, Ketapang, Sintang) dan Kuadran II (Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan rendah–UHH tinggi, mencakup Bengkayang, Melawi, Singkawang, Landak, Kubu Raya, Mempawah). Tidak adanya daerah di Kuadran III/IV menunjukkan capaian kesehatan Kalbar secara umum sudah relatif baik, dan bahwa besaran anggaran bukan satu-satunya penentu UHH, efektivitas layanan dan perilaku hidup sehat turut berperan sebagai *conversion factors.*

Secara simultan, ketiga variabel menjelaskan 92,55% variasi IPM, menegaskan bahwa disparitas pembangunan manusia antarwilayah di Kalbar merupakan hasil interaksi kapasitas ekonomi daerah dengan prioritas belanja pendidikan dan kesehatan, bukan efek satu variabel tunggal. Sisa 7,45% variasi mengindikasikan adanya faktor lain seperti kualitas tata kelola (governance), infrastruktur, dan kemiskinan yang tidak tercakup dalam model.

Secara keseluruhan, pembahasan menegaskan relevansi *Capability Approach* Amartya Sen bahwa keberhasilan pembangunan manusia di Kalimantan Barat tidak semata ditentukan oleh besaran PDRB atau anggaran, melainkan oleh kemampuan masing-masing daerah mengonversi sumber daya ekonomi dan fiskal tersebut menjadi perluasan kapabilitas nyata masyarakat dalam hidup sehat, terdidik, dan berpenghasilan layak.

5. Kesimpulan dan Rekomendasi

PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, dan pengeluaran pemerintah bidang kesehatan terbukti berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat 2016–2024 dengan nilai R^2 sebesar 92,55%, sehingga bagi daerah Kuadran III yang tertinggal secara ekonomi dan IPM (Melawi, Landak, Mempawah, Sekadau, Kayong Utara, Sintang) direkomendasikan perluasan infrastruktur dasar, pemerataan tenaga pendidik dan kesehatan, serta diversifikasi ekonomi, sementara bagi daerah Kuadran IV yang berpendapatan tinggi namun IPM rendah (Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu) direkomendasikan realokasi nilai tambah sektor ekstraktif ke layanan pendidikan dan kesehatan melalui optimalisasi dana bagi hasil, CSR, dan pengembangan

industri pengolahan di dalam daerah agar pertumbuhan ekonomi benar-benar terkonversi menjadi perluasan kapabilitas masyarakat secara merata.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRACT vi
RINGKASAN vii
DAFTAR ISI xii
DAFTAR TABEL xiv
DAFTAR GAMBAR xv
1. PENDAHULUAN 1
2. KAJIAN LITERATUR 6
2.1 Pendekatan Kapabilitas (Capability Approach) 6
2.2. Kajian Empiris 7
2.2.1 Pengaruh PDRB Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia 7
2.3.2 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan 8
2.3.3 Pengaruh PDRB Perkapita, Pengeluaran pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan Terhadap IPM 9
2.3 Kerangka Konseptual dan Hipotesis 9
3. METODE PENELITIAN 10
3.1 Bentuk, Jenis dan Sumber Data Penelitian 10
3.2 Uji Asumsi Klasik 12
3.3 Uji Hipotesis 13
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 13
4.1 Hasil Pemilihan Model Regresi Data Panel 13
4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 14
4.2.1 Uji Normalitas 14
4.2.2 Uji Multikolinieritas 15
4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 15
4.3 Analisis Regresi Linier Berganda 16
4.4 Hasil Uji Hipotesis 17
4.4.1 Uji T (Uji Parsial) 17

4.4.2. Uji F (Simultan) 17
4.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2) 18
4.5 Pembahasan 19
4.5.1. Pengaruh PDRB Per Kapita terhadap Indeks Pembangunan Mannusia 19
4.5.2. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan terhadap IPM 22
4.5.3. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan terhadap IPM 24
4.5.4. Pengaruh Simultan terhadap IPM 27
5. Kesimpulan dan Rekomendasi 28
5.1 Kesimpulan 28
5.2 Rekomendasi 29
DAFTAR RUJUKAN 30
LAMPIRAN 33

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Perbandingan antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM) 13
Tabel 4. 2 Hasil Uji Multikolinieritas 15
Tabel 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Glejser 15
Tabel 4. 4 Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda 16
Tabel 4. 5 Hasil Uji T (Uji Parsial) 17
Tabel 4. 6 Hasil Uji F 17
Tabel 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 IPM Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2026 2

Gambar 1. 2 PDRB Perkapita Harga Konstan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024 3

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual……...10

1. PENDAHULUAN

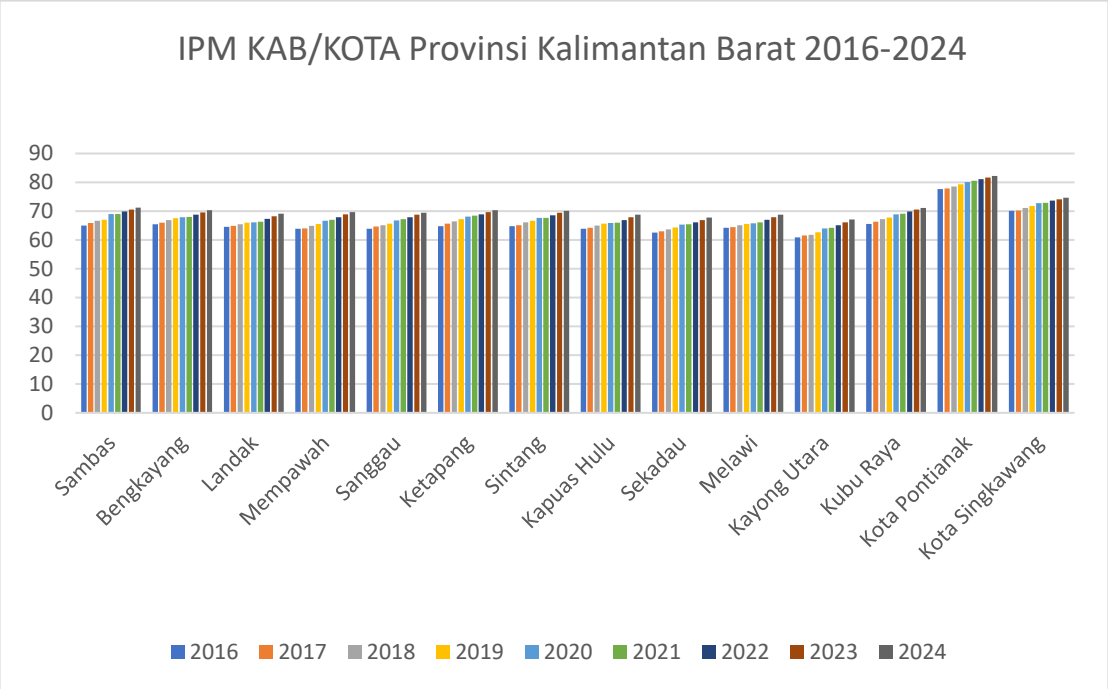
Kualitas sumber daya manusia memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional, mengingat manusia merupakan subjek sekaligus sasaran utama dari proses pembangunan. Seiring dengan berkembangnya paradigma pembangunan, ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi terbatas pada capaian ekonomi semata, tetapi telah bergeser menuju pendekatan yang lebih multidimensional dengan memasukkan aspek pendidikan, tingkat kesehatan, dan harapan hidup sebagai indikator penting dalam menilai kemajuan suatu negara. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa pembangunan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Todaro dan Smith (2011) yang menekankan bahwa esensi pembangunan terletak pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia, penghormatan terhadap martabat kemanusiaan, serta perluasan kesempatan dan kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidupnya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui United Nations Development Programme (UNDP) memperkenalkan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator komprehensif yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan manusia di berbagai negara. IPM dirancang dengan menggabungkan tiga dimensi utama, yaitu aspek umur panjang dan kehidupan yang sehat, tingkat pengetahuan yang dicerminkan melalui pendidikan, serta kemampuan masyarakat dalam mencapai standar hidup yang layak. Kerangka pengukuran ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang berorientasi pada manusia, di mana manusia diposisikan tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan itu sendiri, sehingga pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses peningkatan output ekonomi (UNDP, 2019).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik periode 2016-2024, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia selama periode 2016-2024 menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan yang cukup nyata antarprovinsi. Secara nasional, IPM Indonesia berada pada angka 72,61, namun capaian tersebut belum merata di seluruh wilayah. Beberapa provinsi mencatatkan kinerja yang relatif tinggi, seperti DKI Jakarta dengan rata-rata IPM sebesar 81,73 dan DI Yogyakarta sebesar 80,04, yang keduanya termasuk dalam kategori sangat tinggi. Tingginya IPM di kedua provinsi ini didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, akses layanan kesehatan yang relatif baik, serta aktivitas ekonomi yang lebih maju dibandingkan dengan sebagian besar daerah lainnya.

Berbeda dengan kondisi tersebut, Kalimantan Barat mencatatkan rata-rata IPM sebesar 68,43 dan masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih 4,18 poin, sekaligus menjadi provinsi dengan IPM terendah di antara provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan, tertinggal dari Kalimantan Timur (76,56), Kalimantan Selatan (72,22), Kalimantan Tengah (71,87), dan Kalimantan Utara (71,32). Meskipun IPM Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan dari 65,88 pada tahun 2016 menjadi 71,19 pada tahun 2024, laju peningkatan tersebut masih relatif. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala struktural dalam pembangunan manusia, khususnya terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengeluaran pemerintah di

sektor pendidikan dan kesehatan, serta rendahnya PDRB per kapita dalam mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat.

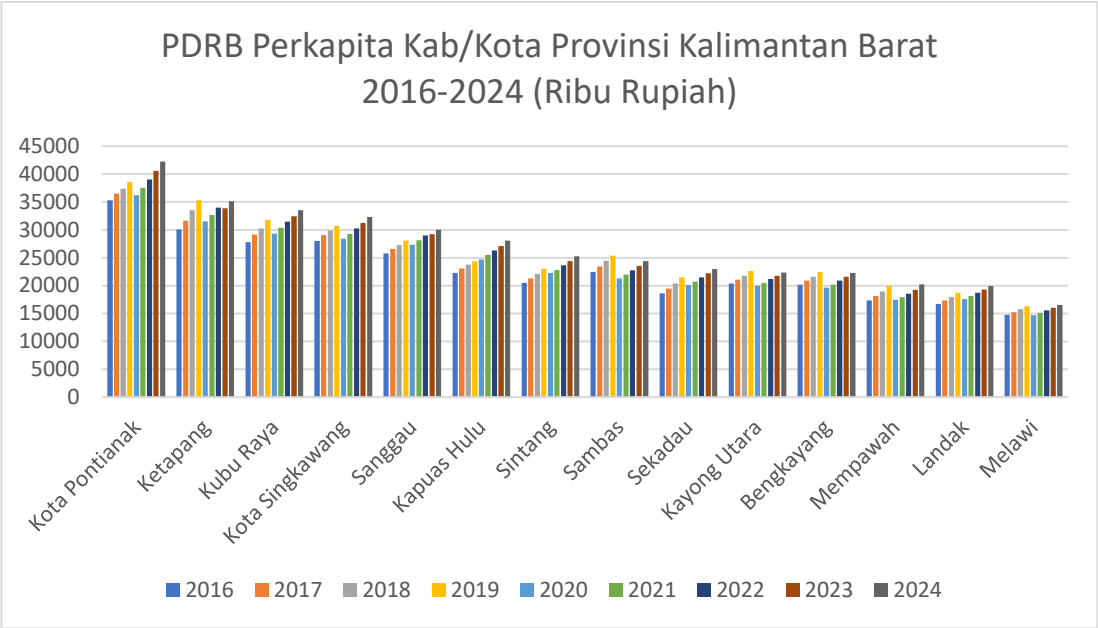


Gambar 1.1 IPM Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2026

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Barat, 2026

Ketimpangan IPM tidak hanya terlihat pada level antarprovisinsi, tetapi juga sangat menonjol di dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Kota Pontianak sebagai pusat pemerintahan mencatat IPM tertinggi di angka 82,22 pada tahun 2024, sedangkan Kabupaten Kayong Utara hanya meraih IPM sebesar 67,05 pada tahun yang sama. Kesenjangan sebesar 15,17 poin dalam satu provinsi mengisyaratkan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Barat masih sangat terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan belum merata hingga ke pelosok.

Ketimpangan yang terjadi diduga memiliki keterkaitan yang signifikan dengan disparitas PDRB per kapita serta besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk sektor pendidikan dan kesehatan. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata kemampuan ekonomi masyarakat dan berkorelasi langsung dengan dimensi pengeluaran dalam perhitungan IPM. Naiknya PDRB per kapita umumnya sejalan dengan meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, maupun tempat tinggal yang layak, sehingga secara tidak langsung turut mendorong perbaikan nilai IPM (Hidayat & Woyanti, 2021).



Gambar 1. 2 PDRB Perkapita Harga Konstan Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2016-2024

Sumber: Badan Pusat Statsitik (BPS) Kalimantan Barat, 2026

Sepanjang kurun waktu 2016 hingga 2024, Kota Pontianak terus-menerus menempati posisi teratas dalam hal PDRB per kapita di antara seluruh kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Nilainya tercatat sebesar Rp35,3 juta pada 2016 dan menunjukkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan hingga menyentuh angka Rp42,27 juta pada 2024. Keunggulan ini tidak lepas dari statusnya sebagai ibu kota provinsi, yang menjadikannya episentrum berbagai aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, maupun pemerintahan. Sebaliknya, Kabupaten Melawi dari tahun ke tahun konsisten berada di posisi paling bawah, dengan PDRB per kapita hanya sebesar Rp14,77 juta pada 2016 dan meningkat terbatas menjadi Rp16,53 juta pada 2024. Kesenjangan nilai PDRB perkapita yang masih cukup lebar antar kabupaten/kota di Kalimantan Barat juga menjadi perhatian penting dalam konteks pembangunan manusia. Pada tahun 2024, terdapat selisih sebesar Rp25.74 juta antara PDRB per kapita tertinggi (Kota Pontianak, Rp42.27 juta) dan terendah (Kabupaten Melawi, Rp16.53 juta).

Kesenjangan PDRB per kapita yang terjadi antarwilayah memiliki hubungan yang erat dengan kesenjangan dalam capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Wilayah dengan tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki nilai IPM yang lebih baik, sebab kapasitas fiskal dan ekonominya yang lebih kuat memungkinkan penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta standar kehidupan yang lebih memadai bagi masyarakatnya. Sebaliknya, daerah yang memiliki PDRB rendah kerap dihadapkan pada berbagai keterbatasan dalam menyelenggarakan layanan publik dasar, sehingga laju peningkatan IPM-nya pun cenderung lebih lambat. Dengan demikian, pola yang tergambar dari data mengindikasikan bahwa ketimpangan di bidang ekonomi di Kalimantan Barat secara langsung terefleksikan dalam ketimpangan pembangunan manusia di antara berbagai wilayah.

Di samping itu, alokasi belanja pemerintah daerah juga memegang peranan yang tidak kalah penting, terutama dalam hal penyediaan infrastruktur serta layanan di bidang pendidikan dan kesehatan. Daerah yang mengalokasikan anggaran publik secara memadai umumnya lebih mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar yang menjadi pilar utama pembentukan IPM. Belanja pemerintah, khususnya yang diarahkan pada fungsi pendidikan dan kesehatan, memiliki peran yang sangat strategis dalam mengangkat kualitas sumber daya manusia karena berhubungan langsung dengan komponen-komponen penyusun IPM. Dalam konteks ini, dimensi pendidikan menjadi sangat krusial karena berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas, keterampilan, serta daya inovasi angkatan kerja. Pendidikan yang bermutu membuka peluang bagi setiap individu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan taraf kesejahteraan hidup mereka (Mustaqim & Achmad, 2022).

Merujuk pada data realisasi anggaran belanja pendidikan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat selama periode 2016–2024, terlihat bahwa alokasi yang dikucurkan oleh masing-masing daerah tergolong cukup besar, meskipun pergerakannya cenderung berfluktuasi dari tahun ke tahun. Sejumlah daerah seperti Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kubu Raya tercatat memiliki nilai realisasi belanja pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Kabupaten Ketapang, sebagai contoh, mengalami lonjakan yang cukup berarti, yakni dari sekitar Rp496 miliar pada tahun 2016 menjadi lebih dari Rp783 miliar pada tahun 2024. Tren ini mengindikasikan adanya kesungguhan pemerintah daerah dalam mendorong kemajuan sektor pendidikan melalui pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi tenaga pengajar, serta perluasan jangkauan layanan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat.

Selain kabupaten-kabupaten tersebut, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak juga mencatatkan realisasi belanja pendidikan yang relatif besar sepanjang periode pengamatan. Besarnya anggaran yang digelontorkan di sektor ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat mutu layanan pendidikan sebagai salah satu pilar strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Investasi di bidang pendidikan ini diharapkan mampu mendongkrak tingkat pengetahuan masyarakat, membuka lebih banyak peluang kerja, sekaligus mengangkat taraf kesejahteraan secara menyeluruh.

Kendati demikian, data yang ada juga memperlihatkan adanya disparitas dalam hal besaran alokasi belanja pendidikan antarwilayah, disertai dengan dinamika perubahan yang berlangsung secara gradual dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut mencerminkan perbedaan kemampuan fiskal serta orientasi prioritas pembangunan yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Ketimpangan dalam alokasi anggaran pendidikan ini berpotensi memberikan dampak terhadap capaian pembangunan manusia, mengingat pendidikan merupakan salah satu dimensi kunci dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh sebab itu, upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah di sektor pendidikan menjadi faktor yang krusial dalam mendukung akselerasi pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat.

Sedangkan dari sisi kesehatan, peningkatan layanan kesehatan dan akses terhadap Sementara itu, dari perspektif kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan serta kemudahan akses terhadap fasilitas kesehatan terbukti berkorelasi secara positif dengan produktivitas tenaga kerja, yang pada akhirnya turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, investasi yang dilakukan di sektor kesehatan merupakan langkah yang bersifat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan (Muslimin & Nursinah, 2023).

Berdasarkan data realisasi pengeluaran pemerintah daerah di sektor kesehatan pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat sepanjang tahun 2016-2024, tampak bahwa anggaran yang direalisasikan untuk sektor ini menunjukkan kecenderungan pertumbuhan dari waktu ke waktu. Beberapa daerah, antara lain Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sanggau, dan Kota Pontianak, mencatatkan nilai realisasi belanja kesehatan yang lebih besar dibandingkan daerah-daerah lainnya. Sebagai gambaran, Kabupaten Ketapang mengalami peningkatan yang cukup mencolok, yakni dari kisaran Rp167 miliar pada tahun 2016 hingga melampaui Rp420 miliar pada tahun 2021, sebelum kemudian mengalami penyesuaian kembali pada tahun-tahun selanjutnya. Kondisi ini mencerminkan adanya kesungguhan pemerintah daerah dalam memperkuat layanan kesehatan melalui berbagai upaya, mulai dari pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan, pemenuhan kebutuhan tenaga medis, hingga pelaksanaan beragam program kesehatan yang menyasar masyarakat luas.

Di samping itu, sejumlah daerah seperti Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Landak juga memperlihatkan kenaikan realisasi belanja kesehatan pada beberapa periode dalam rentang waktu pengamatan. Peningkatan tersebut menjadi cerminan dari komitmen pemerintah daerah dalam terus berbenah guna memperbaiki mutu pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat. Besarnya perhatian pemerintah terhadap sektor kesehatan ini sangat relevan mengingat kaitannya yang langsung dengan peningkatan angka harapan hidup, yang merupakan salah satu komponen pokok dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam konteks ini, Sidabutar et al. (2020) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maupun kesehatan memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap capaian IPM. Temuan yang berbeda dikemukakan oleh Sutono et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa penyerapan belanja pemerintah daerah tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap IPM, sementara belanja yang bersumber dari pemerintah pusat justru terbukti berpengaruh terhadap IPM di Provinsi Riau.

Secara konseptual, pengeluaran pemerintah merupakan instrumen yang memainkan peran vital dalam penyediaan barang dan jasa yang bersifat publik, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar (Mangkoesoebroto, 2000). Alokasi belanja publik yang mencukupi memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap berbagai layanan dasar, yang merupakan elemen-elemen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 2019). Daerah yang memiliki tingkat belanja pemerintah yang lebih tinggi umumnya didukung oleh fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, suatu kondisi yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan

kualitas sumber daya manusia serta pencapaian nilai IPM yang lebih tinggi (Todaro & Smith, 2011).

Sebaliknya, daerah dengan belanja pemerintah yang relatif rendah menghadapi keterbatasan dalam penyediaan layanan dasar. Minimnya alokasi anggaran berdampak pada kurang optimalnya pembangunan fasilitas publik, rendahnya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta terbatasnya infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Akibatnya, peningkatan IPM di daerah tersebut cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan wilayah dengan kapasitas belanja yang lebih besar. Dengan demikian, variasi belanja pemerintah di Kalimantan Barat memiliki implikasi langsung terhadap ketimpangan pembangunan manusia antarwilayah, di mana daerah dengan kemampuan fiskal kuat menunjukkan capaian IPM lebih baik dibandingkan daerah dengan kemampuan fiskal terbatas.